

**STUDI TENTANG IMPLEMENTASI
SISTEM PELAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP-1500/LK/2005 TANGGAL 4 MEI 2005**



**TIM STUDI TENTANG IMPLEMENTASI
SISTEM PELAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP-1500/LK/2005 TANGGAL 4 MEI 2005**

**BIRO RISET DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

2007

ABSTRAKSI

Guna mendukung pemenuhan kesiapan Sistem Pelaporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan (LBPP) menghadapi perkembangan industri jasa pembiayaan perlu dilakukan upaya pengembangan sistem LBPP melalui perumusan suatu kebijakan yang tepat.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan berupa evaluasi dan memberikan masukan guna perbaikan sistem pelaporan keuangan perusahaan pembiayaan sehingga menjadi sistem yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk pengembangan industri jasa pembiayaan yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pengembangan perekonomian secara nasional.

Dari kegiatan kajian yang telah dilakukan diperoleh informasi yaitu informasi yang digunakan dalam mengisi form-form laporan pada sistem LBPP mudah didapat dan bermanfaat. Proses pengisian dan pengiriman laporan oleh Perusahaan Pembiayaan dapat dilakukan dengan mudah. Perusahaan pembiayaan sendiri menginginkan adanya *feedback* berupa data industri yang dipublikasikan sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan bagi manajemen. Untuk memperoleh data sesuai kebutuhan Biro Pembiayaan dan Penjaminan diperlukan pengolahan lebih lanjut sehingga tersedia laporan-laporan yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan industri pembiayaan. Perlunya diadakan sosialisasi yang berkesinambungan untuk menjelaskan perkembangan sistem LBPP dan menjadi saran masukan dalam merespon permasalahan dalam proses pengisian dan pengiriman laporan dari Perusahaan pembiayaan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami telah menyelesaikan studi mengenai Implementasi Sistem Pelaporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 1500/LK/2005 tanggal 4 Mei 2005.

Kegiatan studi tersebut di atas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Biro Riset dan Teknologi Informasi, khususnya Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain dalam rangka memberikan bahan masukan bagi pengambil keputusan.

Pelaksanaan studi mengenai implementasi pelaporan bulanan perusahaan pembiayaan merupakan evaluasi yang bertujuan memberikan gambaran pengembangan sistem laporan bulanan perusahaan pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi bagi industri jasa pembiayaan dan Bapepam LK Departemen Keuangan sebagai regulator.

Berangkat dari tujuan tersebut, tentunya Bapepam LK berkepentingan untuk melakukan suatu sistem pelaporan bulanan perusahaan pembiayaan yang dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Melalui pemanfaatan sistem yang efektif dan efisien tersebut, diharapkan dapat menghasilkan *output* berupa informasi yang dapat dimanfaatkan oleh industri jasa pembiayaan dan Bapepam LK selaku regulator.

Tim mengakui bahwa kegiatan studi ini memiliki banyak kekurangan, untuk itu, kritik dan saran atas hasil studi sangat kami harapkan guna penyempurnaan hasil

studi ini.

Akhir kata, Tim berharap hasil penelitian dan studi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem pelaporan industri jasa pembiayaan melalui peningkatan aspek efektifitas dan efisiensi pelaporan.

Jakarta, Desember 2007

Ketua Tim

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. 1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
I. 2. PERUMUSAN MASALAH.....	5
I. 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
II. 1. KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI.....	7
II. 2. GAMBARAN UMUM SISTEM LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.....	10
II. 3. GAMBARAN UMUM SISTEM PELAPORAN BERKALA BANK UMUM.....	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	20
III. 1. METODE PENGUMPULAN DATA.....	20
III. 2. DATA	22
III. 3. KETERBATASAN STUDI.....	23
BAB IV ANALISIS DATA	24
IV. 1. DATA RESPONDEN.....	24

IV. 2.	KEMUDAHAN DALAM MENGISI SEMUA FORM YANG DIMINTA DALAM SISTEM LBPP	30
IV. 3.	INFORMASI YANG BERMANFAAT DALAM LBPP	31
IV. 4.	PROSES PENGISIAN DAN PENGIRIMAN DATA.....	32
IV. 5.	KEBUTUHAN DATA INDUSTRI BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	34
IV. 6.	PENGGUNAAN LAPORAN HASIL SISTEM LBPP	36
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	38
V. 1.	KESIMPULAN	38
V. 2.	REKOMENDASI	38
	DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jabatan Responden di Perusahaan	24
Tabel 2 Bagian/Divisi	25
Tabel 3 Status Kepemilikan Perusahaan.....	25
Tabel 4 <i>Cross Tabulation</i> antara Status Kepemilikan dan Aset Perusahaan.....	26
Tabel 5 Bentuk Badan Usaha.....	26
Tabel 6 Sifat Perusahaan.....	26
Tabel 7 Aset Perusahaan.....	27
Tabel 8 Sebaran Kantor Cabang	28
Tabel 9 <i>Cross Tabulation</i> antara Sebaran Kantor Cabang dan Aset Perusahaan	28
Tabel 10 Jumlah Karyawan	29
Tabel 11 Korelasi antara Aset Perusahaan, Sebaran Kantor Cabang dan Jumlah Karyawan	29
Tabel 12 LBPP Mudah Diisi.....	30
Tabel 13 LBPP Bermanfaat	31
Tabel 14 Mudah Mengisi Form LBPP.....	32
Tabel 15 Mudah Mengirim Laporan Via <i>online</i>	33
Tabel 16 Penggunaan <i>Windows</i> memudahkan LBPP	34
Tabel 17 Setuju apabila operating sistem LBPP diubah ke <i>Open source</i>	34
Tabel 18 Perusahaan memerlukan Data Industri yang disebarluaskan.....	34
Tabel 19 Informasi Data Industri yang dibutuhkan	35

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Bidang usaha lembaga pembiayaan mencakup beberapa alternatif kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), kartu kredit (*credit card*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

Memasuki dekade tahun 2000 industri jasa pembiayaan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menuntut industri jasa pembiayaan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan yang sangat kompleks.

Perkembangan industri jasa pembiayaan ini secara keseluruhan telah mampu menjadikannya sebagai suatu industri yang cukup menonjol dalam dunia bisnis khususnya sektor keuangan yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi secara nasional.

Peranan yang menonjol dari industri jasa pembiayaan adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri (konsumsi). Dana yang disalurkan oleh industri jasa pembiayaan kepada masyarakat

diharapkan akan dapat bermanfaat untuk mendorong perkembangan perekonomian nasional.

Dengan perkembangan kegiatan industri jasa pembiayaan yang sedemikian pesat, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dituntut untuk mengoptimalkan perannya sebagai regulator dan supervisor kegiatan jasa pembiayaan melalui upaya kebijakan yang mendorong kearah perkembangan industri jasa pembiayaan secara berkesinambungan.

Salah satu upaya Departemen Keuangan dalam rangka optimalisasi peran dilakukan melalui peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan industri jasa pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap industri jasa pembiayaan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan tidak langsung terhadap industri jasa pembiayaan antara lain dengan melakukan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Menteri Keuangan. Laporan berkala yang disampaikan tersebut meliputi laporan keuangan bulanan, laporan kegiatan usaha semesteran, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi pengawasan tidak langsung secara lebih optimal melalui kegiatan analisis terhadap laporan berkala perusahaan pembiayaan perlu ditunjang oleh perangkat yang memadai antara lain dalam bentuk sistem pelaporan yang memuat semua unsur informasi yang penting dalam industri jasa pembiayaan, dukungan teknologi informasi dan landasan hukum dari kegiatan pelaporan perusahaan pembiayaan.

Untuk menunjang kegiatan pelaporan industri jasa pembiayaan yang lebih efektif dan efisien sekaligus memperkaya sistem pelaporan perusahaan pembiayaan, Departemen Keuangan telah melakukan kebijakan diantaranya melalui penyempurnaan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor SE-1087/LK/1996 tanggal 27 Februari 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK06/2002.

Kebijakan penyempurnaan ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Sanksi Bagi Perusahaan Pembiayaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-1500/LK/2005 tanggal 4 Mei 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Perusahaan Pembiayaan (Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan) yang mulai berlaku secara efektif pada bulan November 2005.

Pengembangan Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan (LBPP) didasari pada kebutuhan para pengguna informasi khususnya dalam rangka perumusan kebijakan pengawasan perusahaan pembiayaan yang lebih intensif. Dengan diberlakukannya LBPP ini maka informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan diharapkan dapat lebih efisiensi dan mengurangi duplikasi informasi dalam setiap laporan yang disampaikan kepada Departemen Keuangan.

Agar lebih menjamin kualitas pengelolaan dan akurasi data dalam penerapan sistem LBPP, Departemen Keuangan telah melengkapi LBPP tersebut dengan suatu sistem aplikasi teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi ini dilakukan

Departemen Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia dengan menyediakan sistem aplikasi teknologi informasi.

Dengan penerapan sistem aplikasi teknologi informasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses mulai dari *input*, pengolahan basis data industri Perusahaan Pembiayaan sampai dengan dapat dihasilkannya berbagai *output* (informasi) dengan lebih cepat dan akurat.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi atas sistem LBPP oleh Bank Indonesia, dapat diperoleh manfaat terkait dengan fungsi pembinaan dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan oleh Departemen Keuangan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Departemen Keuangan dapat men-*download* seluruh data yang disediakan Bank Indonesia mengenai kondisi keuangan perusahaan pembiayaan baik secara individual maupun industri sesuai dengan format *output* yang disepakati melalui aplikasi Web server Bank Indonesia.
- b. Departemen Keuangan dapat men-*download* seluruh *raw data* Perusahaan Pembiayaan yang akan digunakan sebagai database Perusahaan Pembiayaan di Departemen Keuangan.
- c. Departemen Keuangan memperoleh akses langsung ke aplikasi sistem untuk memberikan pengumuman kepada seluruh Perusahaan Pembiayaan terkait dengan ketaatan pelaporan Laporan Bulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran.

Sebagai rangkaian kegiatan penerapan sistem LBPP kepada industri jasa pembiayaan secara penuh, Departemen Keuangan dengan dibantu Bank Indonesia telah pula melakukan beberapa kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihan kepada perusahaan pembiayaan mengenai teknis operasional penerapan sistem LBPP.

Dengan penerapan sistem LBPP ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data bagi Departemen Keuangan selaku pembina dan pengawas industri jasa pembiayaan, Bank Indonesia, dan kalangan industri perusahaan pembiayaan dalam pengembangan kegiatan usahanya.

Dengan memperhatikan perkembangan pesat industri perusahaan pembiayaan sekarang ini yang banyak memerlukan informasi, sumber daya manusia yang berkembang secara dinamis, dan kesiapan *output* yang dihasilkan sistem aplikasi LBPP itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan Departemen Keuangan dalam rangka pengambilan kebijakan, kiranya perlu dilakukan upaya-upaya yang mengarah kepada pemenuhan kesiapan Sistem LBPP dalam mengantisipasi dampak dari faktor-faktor tersebut.

Guna mendukung pemenuhan kesiapan LBPP menghadapi perkembangan industri jasa pembiayaan perlu dilakukan upaya pengembangan sistem LBPP melalui perumusan suatu kebijakan yang tepat. Untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan diperlukan berbagai sumber informasi yang baik.

Salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan bahan masukan pengambilan kebijakan adalah kajian terhadap sistem LBPP. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan “Studi tentang Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-1500/LK/2005 Tanggal 4 Mei 2005”.

I. 2. PERUMUSAN MASALAH

Dari hasil pengamatan terhadap proses penerapan sistem LBPP, ditemukan substansi yang memerlukan telaah lebih lanjut mengingat belum optimalnya *output* yang dihasilkan oleh implementasi sistem LBPP yang berdampak terhadap kurang efektifnya penggunaan data LBPP sebagai bahan informasi pengambilan keputusan

bagi regulator dan industri jasa pembiayaan. Indikasi adanya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Output* sistem pelaporan keuangan perusahaan pembiayaan merupakan data mentah yang harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Departemen Keuangan.
- b. Kesiapan perusahaan pembiayaan dalam mengimplementasikan sistem tersebut.
- c. Belum optimalnya penggunaan sistem pelaporan keuangan bagi pengambilan keputusan oleh manajemen Perusahaan Pembiayaan.

I. 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat tercapai tujuan berupa evaluasi dan memberikan masukan guna perbaikan sistem pelaporan keuangan perusahaan pembiayaan sehingga menjadi sistem yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk pengembangan industri jasa pembiayaan yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pengembangan perekonomian secara nasional.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II. 1. KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI

Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap sistem harus mempunyai tujuan (*goal*) yang jumlahnya bisa satu atau mungkin lebih. Tujuan inilah yang menjadi penggerak motivasi dalam mengarahkan sistem untuk berjalan baik, tanpa tujuan sistem menjadi tidak terarah dan terkendali secara baik.

Dalam suatu sistem perlu adanya suatu masukan (*input*) ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Melalui tahap proses yang merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Dalam sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan yang bermacam-macam, meringkas data, melakukan perhitungan dan mengurutkan data merupakan beberapa contoh proses.

Hasil dari suatu proses adalah keluaran (*output*) yang merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan dan sebagainya.

Dalam rangka menjamin sistem berjalan sesuai tujuan perlu mekanisme pengendalian (*control mechanism*) dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses

Sistem informasi sebagai sistem merupakan suatu pengumpulan data yang terorganisir beserta tata cara penggunaannya yang mencakup lebih jauh dari pada sekedar penyajian.

Keberhasilan suatu sistem informasi yang diukur berdasarkan maksud pembuatannya tergantung pada tiga faktor utama, yaitu keserasian dan mutu data, pengorganisasian data, dan tata cara penggunaan data.¹

Guna menjamin berjalannya suatu sistem informasi perlu didukung oleh komponen-komponen sebagai berikut:

- Perangkat keras (*hardware*): mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer
- Perangkat lunak (*software*) atau program: sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data
- Prosedur: sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki
- Orang: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi
- Basis data (*database*): sekumpulan *table*, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpan data.
- Jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Dalam pengembangan sistem informasi yang berbasis pelaporan tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem informasi itu sendiri. Selanjutnya, dalam pemanfaatan teknologi dalam suatu sistem informasi,

¹ Tejoyuwono Notohadiprawiro, Bahan Seminar UGM, Oktober 1990

sistem pelaporan yang dilakukan secara elektronik perlu memperhatikan sistem pelaporan (*reporting sistem*) yang terkait sistem itu sendiri. Hal ini dikarenakan kelancaran dan mutu data yang akan diolah sangat tergantung dengan kehandalan sistem pelaporan tersebut.

Untuk menyusun sistem pelaporan yang ideal diperlukan 6 (enam) prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu²:

a. *Timely* (tepat waktu)

Agar informasi dan data dapat digunakan secara maksimal, sistem pelaporan harus meyakinkan penggunaannya bahwa informasi dan data yang diperlukan dapat disajikan secara cepat dan tepat waktu.

b. *Accurate* (keakuratan)

Informasi dan data yang dilaporkan harus bebas dari kesalahan dan manipulasi

c. *Reasonable* (tingkat kesulitan)

Pihak penerima laporan (regulator) harus mempertimbangkan tingkat kesulitan yang dihadapi pihak pelapor dalam menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sistem dan mekanisme pelaporan jangan sampai menyulitkan pihak pelapor sehingga menghasilkan hasil yang kontraproduktif.

d. *Relevant* (relevansi)

Data dan informasi yang disampaikan oleh pelapor dan kemudian diolah oleh penerima laporan harus menghasilkan informasi yang benar-benar dibutuhkan sebagaimana yang telah ditentukan.

² Hasil studi Analisis Laporan Keuangan Secara Elektronik, Bapepam, 2005

e. *Efficient* (efisien)

Biaya yang diperlukan dalam rangka pengumpulan data dan informasi harus proporsional dengan besarnya manfaat dan nilai informasi yang dihasilkan.

f. *Transforming* (dapat diolah)

Data dan informasi yang diterima harus dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut dan mempermudah user (analisis) untuk melakukan kajian lebih lanjut. Hal ini dikarenakan banyak sistem pelaporan yang menghasilkan data yang statis, tidak up-to-date, dan tidak dapat diolah kembali.

II. 2. GAMBARAN UMUM SISTEM LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Sebagaimana diketahui, sistem Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP-1500/LK/2005 tanggal 4 Mei 2005.

Laporan Perusahaan Pembiayaan disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam buku pedoman yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Pembiayaan baik individual maupun gabungan dalam rangka:

- Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan,
- Pencatatan dan analisis moneter maupun stabilitas sistem keuangan,
- Pemenuhan keperluan internal Perusahaan Pembiayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan secara benar dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Dalam sistem LBPP tersebut dianut asas-asas sistem pelaporan yang meliputi:

- a. Pemisahan antara neraca dan rekening administratif
- b. Pemisahan transaksi dengan bank dan Pemerintah Pusat

c. Pemisahan Penduduk dan bukan penduduk

Laporan keuangan bulanan dan laporan kegiatan usaha semesteran harus disajikan dalam mata uang rupiah. Harta, kewajiban, dan rekening-rekening administratif dalam valuta asing yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

Perusahaan Pembiayaan wajib membuat laporan keuangan bulanan dan laporan kegiatan usaha semesteran yang mencakup seluruh kegiatan kantor-kantornya di Indonesia sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Bulanan, terdiri dari :
 - a.1. Laporan Profil Perusahaan, yang dilengkapi dengan:
 - a.1.1. Daftar Rincian Izin Usaha
 - a.1.2. Daftar Rincian Pemegang Saham
 - a.1.3. Daftar Rincian Pemegang Saham dan Pengurus Derajat Kedua
 - a.1.4. Daftar Rincian Pengurus
 - a.1.5. Daftar Rincian Kantor Cabang
 - a.1.6. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Karyawan
 - a.2. Laporan Keuangan, yang terdiri dari :
 - a.2.1. Neraca Bulanan
 - a.2.2. Perhitungan Laba/Rugi
 - a.2.3. Rekening Administratif
 - a.2.4. Laporan Arus Kas
 - a.2.5. Daftar Rincian, yang terdiri dari:
 - Laporan Profil Jatuh Tempo Piutang Pembiayaan

- Daftar Rincian Surat Berharga yang dimiliki
- Daftar Rincian Piutang Pembiayaan
- Daftar Rincian Penyertaan Modal
- Daftar Pinjaman yang diterima
- Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan

b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran, terdiri dari:

1. Laporan Kegiatan Sewa Guna Usaha
2. Laporan Kegiatan Anjak Piutang
3. Laporan Kegiatan Kartu Kredit
4. Laporan Kegiatan Pembiayaan Konsumen

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfa numerik dengan menggunakan program *data entry*. Cara pengisian formulir diatur lebih lanjut dalam buku Petunjuk Pengoperasian Otomasi Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran Perusahaan Pembiayaan.

Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran disampaikan kepada Departemen Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran oleh Perusahaan Pembiayaan dilakukan secara *on-line* melalui jaringan ektranet Bank Indonesia.

Bagian Laporan Keuangan Bulanan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Rekening Administratif disampaikan dalam bentuk *hardcopy* kepada Menteri Keuangan.

Dalam hal terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan Perusahaan Pembiayaan tidak dapat menyampaikan laporan secara *on-line*, maka laporan disampaikan secara

off-line dengan menggunakan disket rekaman data laporan beserta alasan/penyebabnya yang disampaikan kepada Bank Indonesia, c.q. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Bagian Statistik Moneter, dengan alamat Gedung B lantai 15, Jl. MH Thamrin No 2, Jakarta 10110. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang berkantor pusat di luar Jabotabek laporan disampaikan ke Kantor Bank Indonesia setempat.

Batas waktu penyampaian laporan dan koreksinya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya.
- b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode semester yang bersangkutan berakhir.

Batas waktu penyampaian bagian Laporan Keuangan Bulanan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Rekening Administratif secara *hardcopy* kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang berkantor pusat di luar Jabotabek, laporan dinyatakan telah diterima berdasarkan tanggal stempel pos.

Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, baik libur khusus maupun libur umum, maka batas waktu terakhir penyampaian laporan tersebut adalah hari kerja berikutnya.

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan tidak menyampaikan laporan, terlambat menyampaikan laporan, menyampaikan laporan secara tidak lengkap, dan/atau menyampaikan laporan secara tidak benar dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Dalam rangka otomatisasi LBPP, Bank Indonesia mengembangkan sistem aplikasi yang secara umum meliputi:

- a. Sistem LBPP terdiri dari 4 (empat) aplikasi utama yaitu aplikasi Perusahaan Pembiayaan, aplikasi Web Server, aplikasi Kantor Bank Indonesia (KBI) dan aplikasi Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI);
- b. Sistem LBPP dikembangkan dengan menggunakan jaringan komunikasi Ekstranet Bank Indonesia.
- c. Aplikasi Perusahaan Pembiayaan digunakan untuk proses *input* data, impor data, ekspor data, gabung data, validasi dan pengiriman data LBPP secara *on line* atau *off line* oleh Perusahaan Pembiayaan. Dengan adanya proses validasi pada aplikasi, maka seluruh data LBPP yang dikirim oleh Perusahaan Pembiayaan melalui sistem LBPP telah bersih dan bebas dari kesalahan.
- d. Aplikasi Web Server dikembangkan di Bank Indonesia yang digunakan untuk pengelolaan sandi dan informasi pokok Perusahaan Pembiayaan, penerimaan data secara *on line*, pengiriman tanda bukti penerimaan data secara *on line*, absensi penerimaan laporan, pembuatan laporan *output* Perusahaan Pembiayaan, validasi data dan konversi laporan data Perusahaan Pembiayaan format sistem lama ke format sistem baru.
- e. Aplikasi KBI digunakan untuk penerimaan data dan pencetakan tanda bukti atas penerimaan data LBPP Perusahaan Pembiayaan di wilayah KBI secara *off-line* serta proses *up-load* data yang diterima ke server di KPBI.
- f. Aplikasi KPBI digunakan untuk penerimaan data dan pencetakan tanda bukti atas penerimaan data LBPP Perusahaan Pembiayaan di wilayah

KPBI secara *off-line* serta proses *up-load* data yang diterima berupa teks file ke mainframe.

Dari uraian mengenai gambaran umum pedoman sistem LBPP di atas, dapat diketahui bahwa LBPP sebagai suatu sistem informasi telah memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki. Sejalan dengan itu, LBPP sebagai suatu sistem pelaporan perlu pula memenuhi prinsip-prinsip utama dalam sistem pelaporan agar dapat dihasilkan *output* yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem LBPP.

II. 3. GAMBARAN UMUM SISTEM PELAPORAN BERKALA BANK UMUM

Untuk lebih memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan dari suatu sistem pelaporan berikut gambaran substansi yang mirip LBPP yaitu penerapan sistem pelaporan yang berlaku pada Bank Umum.

Berdasarkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum bahwa untuk mendukung perolehan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu perlu diatur ketentuan mengenai sistematika penyusunan dan penyampaian Laporan Berkala Bank Umum (LBBU). Sistematika LBBU tersebut telah disusun dalam Pedoman Penyusunan LBBU.

Bank Pelapor sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum maka penyusunan dan penyampaian LBBU dilakukan oleh kantor pusat Bank. Termasuk pengertian kantor pusat Bank adalah Kantor Cabang Bank Asing yang berkedudukan dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

Bank diminta untuk menunjuk petugas dan penanggung jawab yang mempunyai wewenang untuk memberikan otorisasi mengenai keabsahan dan keakuratan data

yang disampaikan. Penunjukan petugas dan penanggungjawab LBBU dimaksud tidak mengurangi dan atau menghilangkan tanggung jawab dari pengurus Bank yaitu direksi Bank, komisaris Bank, dan atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing atas keabsahan dan keakuratan LBBU yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia. Daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia, termasuk apabila terdapat perubahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada:

1. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, up. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
2. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Ruang Lingkup data Laporan Berkala Bank Umum yang dilaporkan meliputi:

- a. Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan, dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah Data LBBU mengenai Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan, dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor Bank di Indonesia.
- b. *Maturity Profile* Data LBBU mengenai *Maturity Profile* memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Data LBBU mengenai BMPK yang terdiri dari Laporan Pelanggaran BMPK, Laporan Pelampauan BMPK, dan Laporan Penyediaan Dana, memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

- d. Kredit yang direstrukturisasi Data LBBU mengenai Kredit yang direstrukturisasi memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri.
- e. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan Risiko Pasar Data LBBU mengenai KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri.
- f. Deposan dan Debitur Inti Data LBBU mengenai Deposan dan Debitur Inti memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri.
- g. *Sensitivity to Market Risk* Data LBBU mengenai *Sensitivity to Market Risk* memuat data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang Bank di dalam negeri maupun di luar negeri.

Format Laporan Berkala Bank Umum terdiri dari:

1. Format LBBU untuk data Dana Pihak Ketiga, Pos-pos Neraca Mingguan, dan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah adalah sesuai dengan format dalam Formulir-1, Formulir-2, dan Formulir-3 Pedoman Penyusunan LBBU.
2. Format LBBU untuk data *Maturity Profile* adalah sesuai dengan format dalam Formulir-4a dan Formulir-4b Pedoman Penyusunan LBBU.
3. Format LBBU untuk data BMPK adalah sesuai dengan format dalam Formulir- 5, Formulir-6, dan Formulir-7 Pedoman Penyusunan LBBU.
4. Format LBBU untuk data Kredit yang direstrukturisasi adalah sesuai dengan format dalam Formulir-8 Pedoman Penyusunan LBBU.
5. Format LBBU untuk data Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan

memperhitungkan Risiko Pasar adalah sesuai dengan format dalam Formulir-9a, Formulir-9b, Formulir-9c, Formulir-9d, Formulir-9e, dan Formulir-9f Pedoman Penyusunan LBBU.

6. Format LBBU untuk data Deposan dan Debitur Inti adalah sesuai dengan format dalam Formulir-10 Pedoman Penyusunan LBBU.
7. Format LBBU untuk data *Sensitivity to Market Risk* adalah sesuai dengan format dalam Formulir-11 dan Formulir-12 Pedoman Penyusunan LBBU.

Sesuai dengan Pasal 2 PBI Nomor 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, salah satu yang dipersyaratkan dalam penyampaian LBBU adalah kelengkapan LBBU. Kelengkapan LBBU dinilai dari kelengkapan formulir data yang wajib disampaikan untuk setiap periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum.

LBBU yang disampaikan melewati periode penyampaian yang ditetapkan, disampaikan dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya dan hasil cetak komputer (*hard copy*) kepada:

- i. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, up. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- ii. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Apabila dalam pelaksanaan penyusunan dan penyampaian LBBU terdapat hal-hal yang kurang jelas, Bank dapat menyampaikan pertanyaan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank

Indonesia, pertanyaan diajukan kepada:

- a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, mengenai Formulir-1, Formulir-2, dan Formulir-3;
 - b. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, mengenai Formulir 4a sampai dengan Formulir-12.
2. Bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, pertanyaan diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

Hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi sistem penyampaian laporan, pertanyaan diajukan kepada Direktorat Statistik

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III. 1. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian mengenai implementasi sistem LBPP menggunakan metode pengumpulan data melalui survey, wawancara dan studi literatur.

III.1.1. Survey (sampling)

Penelitian dilakukan atas sampel Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan data dari Biro Pembiayaan dan Penjaminan terdapat 208 Perusahaan Pembiayaan yang masih aktif melakukan kegiatan usahanya di Indonesia pada awal tahun 2007.

Survey dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria. Daftar pertanyaan pada kuesioner dikembangkan dalam rapat tim studi berdasarkan pada tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya. Daftar pertanyaan kuesioner terdapat dalam lampiran 1.

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikembalikan ke Biro Riset dan Teknologi Informasi untuk kemudian ditabulasi dan di analisis.

Dalam perhitungan skor kuesioner, *item-item* pengukuran yang digunakan tidak mendapat bobot tertentu. Hal tersebut dilakukan karena penetapan bobot atas masing-masing *item* informasi harus dilaksanakan berdasarkan argumentasi yang kuat untuk mengurangi subyektifitas. Kuesioner terdiri dari pertanyaan utama dan pertanyaan penjelas. Jika suatu unsur yang ditanyakan pada pertanyaan utama dijawab "Ya", maka diberi nilai satu, jika unsur tersebut dijawab "Tidak" maka mendapat nilai

nol. Sedangkan jawaban yang tidak diisi (*not applicable*) tidak diikutkan dalam hitungan skor.

Skor kuesioner dihitung dengan membagi nilai absolut yang didapat dengan hasil dari total *item* pengungkapan. Berdasarkan daftar pertanyaan utama yang telah ditetapkan oleh Tim Studi, ada 25 *item* yang harus dijawab oleh seluruh Perusahaan Pembiayaan.

Daftar pertanyaan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. kemudahan dalam pengisian form LBPP
2. manfaat informasi yang terkandung dalam laporan LBPP
3. kemudahan dalam pengisian dan pengiriman laporan LBPP
4. penggunaan *operating sistem Windows* dan *open source*
5. permintaan data industri perusahaan pembiayaan

Skor kuesioner tersebut kemudian dipersentasekan. Nilai dari persentase tersebut kemudian akan menjadi nilai yang diberikan Perusahaan Pembiayaan kepada sistem LBPP.

Hasil dari kuesioner ini kemudian akan dibandingkan dengan hasil wawancara dan hasil studi literatur

III.1.2. Wawancara

Tim Studi juga menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, untuk memperoleh gambaran penyajian dan penyusunan laporan-laporan keuangan yang dilaporkan Perusahaan Pembiayaan dalam Sistem Pelaporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

di Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen keuangan.

III.1.3. Studi literatur

Dalam rangka studi ini dilakukan pula penelitian kepustakaan atas buku-buku yang berhubungan dengan pembiayaan, majalah, koran, Internet, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, peraturan Bapepam dan Peraturan Bank Indonesia.

III. 2. DATA

III.2.1. Metode Penentuan Sampling

Sampel dipilih dengan metode *purposive random sampling* dengan kriteria perusahaan-perusahaan tersebut masih memiliki izin usaha Perusahaan Pembiayaan per 23 Maret 2007. Berdasarkan kriteria tersebut maka perusahaan yang dapat terpilih menjadi sampel adalah 208 perusahaan.

III.2.2. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah hasil survey yang dilakukan kepada 99 perusahaan pembiayaan yang mengembalikan kuesioner dengan cara mengisi kuesioner dengan metode *self administered*. Cara ini tidak memungkinkan responden untuk bertanya mengenai maksud pertanyaan pada kuesioner, akan tetapi dalam kuesioner tersebut terdapat pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden mengungkapkan apa saja yang diinginkannya.

III.2.2.1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan pada studi kali ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data dan waktu. Akan tetapi anggota tim studi tetap mengumpulkan bahan studi melalui media lain yang memungkinkan, seperti studi kepustakaan.

III.2.2.2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada anggota tim studi yang berasal dari Biro Pembiayaan dan Penjaminan. Pertanyaan yang diajukan pada wawancara tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai temuan hasil survey.

III.2.3. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan pembiayaan untuk bulan Desember 2006 serta informasi lain yang didapat dalam studi kepustakaan.

III. 3. KETERBATASAN STUDI

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini.

1. Kuesioner pada penelitian ini diisi dengan menggunakan cara *self administered questions*. Dengan metode ini, *response rate* yang didapat rendah dan responden tidak dapat merespon balik jika ada pertanyaan yang kurang jelas. Penelitian berikutnya sebaiknya menggabungkan metode *self administered* dengan metode wawancara.
2. Kuesioner hanya membahas informasi umum sistem LBPP. Informasi mengenai teknis pengisian, teknis pengiriman dan validasi tidak dibahas dalam kuesioner ini. Sebaiknya, penelitian selanjutnya menambahkan unsur informasi mengenai prosedur tersebut sehingga kuesioner akan menjadi lebih komprehensif.

BAB IV ANALISIS DATA

IV. 1. DATA RESPONDEN

Responden dalam penelitian ini adalah 99 perusahaan pembiayaan yang masih memiliki izin dari Departemen Keuangan. Karakteristik responden kemudian akan dibahas berikut ini.

IV.1.1. Jabatan Responden

Tabel 1 Jabatan Responden di Perusahaan

	n	%
Staf	29	29,29%
Manager	58	58,59%
Direksi	10	10,10%
Lainnya	2	2,02%
Jumlah	99	100,00%

Sebanyak 58,59% responden yang menjawab adalah manager perusahaan. Sedangkan sisanya sebanyak 29,29% adalah staf dan 10,10% adalah Direksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem LBPP berada dalam lingkup tanggung jawab manajemen tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini merupakan salah satu alat bantu pengambilan keputusan bagi manajemen *level* menengah.

IV.1.2. Bagian/divisi

Sistem LBPP sangat berkaitan dengan Bagian/Divisi Keuangan. Hal ini dapat disimpulkan dari 89,58% responden yang berasal dari bagian/divisi

keuangan/akuntansi. Sistem LBPP merupakan sistem pelaporan keuangan, sehingga data sumber yang diperlukan dalam sistem ini berada dalam tanggung jawab divisi akuntansi dan keuangan.

Tabel 2 Bagian/Divisi

	N	%
SDM	1	1,01%
Sekretariat/Humas	5	5,05%
Keuangan/Akuntansi	89	89,90%
Lainnya	4	4,04%
Jumlah	99	100,00%

IV.1.3. Status Kepemilikan Perusahaan

Tabel 3 Status Kepemilikan Perusahaan

	N	%
Tidak Mengisi/NA	0	0,00%
BUMN	1	1,01%
Swasta Nasional	82	82,83%
Patungan (JV)	16	16,16%
Lainnya	0	0,00%
Jumlah	99	100,00%

Banyaknya perusahaan swasta nasional yang mendominasi kepemilikan perusahaan pembiayaan tidak membuatnya mendominasi aset industri ini. Dari hasil *cross tabulation* antara status kepemilikan dan aset perusahaan didapat semua perusahaan patungan yang mengikuti survey ini merupakan perusahaan beraset besar. Hal ini terutama disebabkan mudahnya akses pendanaan bagi perusahaan patungan. Tantangan tentu ditujukan bagi perusahaan swasta nasional untuk lebih giat mempromosikan dirinya kepada pemodal asing sehingga mendapatkan dana yang lebih besar.

Tabel 4 Cross Tabulation antara Status Kepemilikan dan Aset Perusahaan

StsKepemilikanPT * Aset Perusahaan Crosstabulation

Count		Aset Perusahaan				Total
		1	2	3	4	
StsKepemilikanPT	1				1	1
	2	1	5	8	68	82
	3				16	16
Total		1	5	8	85	99

IV.1.4. Bentuk Badan Usaha

Tabel 5 Bentuk Badan Usaha

	n	%
Perseroan Terbatas	98	98,99%
Koperasi	1	1,01%
Jumlah	99	100,00%

Badan usaha perusahaan pembiayaan dimungkinkan untuk berbentuk badan usaha koperasi dan perseroan terbatas. Hal ini tercantum dalam PMK 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dari populasi perusahaan pembiayaan, hanya satu perusahaan yang memiliki badan usaha koperasi. Ini disebabkan tingginya modal awal yang disyaratkan kepada koperasi untuk mendirikan perusahaan pembiayaan yaitu sebesar 50 milyar rupiah.

IV.1.5. Sifat Perusahaan

Tabel 6 Sifat Perusahaan

	N	%
Koperasi	1	1,01%
Perusahaan Terbuka (Tbk)	6	6,06%
Perusahaan Non Terbuka	92	92,93%
Jumlah	99	100,00%

Sebanyak 7 (tujuh) perusahaan pembiayaan telah menjadi perusahaan terbuka (Tbk). Sedangkan sisanya merupakan perusahaan non terbuka. Jumlah perusahaan pembiayaan yang menjadi perusahaan terbuka menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 9 (sembilan perusahaan). Hal ini sangat disayangkan karena pasar modal merupakan salah satu sarana bagi perusahaan pembiayaan untuk mencari dana segar untuk pendanaan perusahaan. Akan tetapi, tidak sedikit perusahaan pembiayaan yang mengeluarkan obligasi korporasi sebagai cara lain untuk meraih tambahan dana. Ini disebabkan obligasi lebih cocok dengan perputaran usaha perusahaan.

IV.1.6. Aset Perusahaan

Tabel 7 Aset Perusahaan

	n	%
Kurang dari Rp. 25 milyar	21	21,21%
antara Rp. 25 milyar - Rp. 80 milyar	15	15,15%
antara Rp. 81 milyar - Rp. 250 milyar	26	26,26%
Lebih dari Rp. 250 milyar	37	37,37%
Jumlah	99	100,00%

Berdasarkan PMK 84/PMK.012/2006, modal disetor dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan untuk perusahaan dan perusahaan swasta nasional adalah 100 milyar rupiah. Dengan peraturan ini, masih banyak perusahaan pembiayaan yang telah memiliki izin yang harus menambah modal disetornya jika ingin mengubah izin usaha. Dari data diatas, hampir sebagian besar perusahaan masih memiliki aset dibawah 250 milyar rupiah. Batas atas *gearing ratio* (Jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (networth) dan Pinjaman Subordinasi dikurangi penyertaan) yang diperbolehkan dalam peraturan diatas adalah sebesar 10 kali modal sendiri, maka akan sangat mungkin banyakk perusahaan pembiayaan harus waspada dengan ketentuan baru ini.

IV.1.7. Sebaran Kantor Cabang

Tabel 8 Sebaran Kantor Cabang

	n	%
Tidak ada cabang	43	43,43%
1 s.d. 5 cabang	21	21,21%
6 s.d. 16 cabang	17	17,17%
17 s.d. 22 cabang	5	5,05%
> 22 cabang	13	13,13%
	99	100,00%

Perusahaan yang tidak mempunyai cabang, memiliki aset yang beragam. Sedangkan perusahaan yang memiliki banyak cabang memiliki aset yang besar. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Cross Tabulation antara Sebaran Kantor Cabang dan Aset Perusahaan

Sebaran kantor cabang * Aset Perusahaan Crosstabulation

Count		Aset Perusahaan				Total
		1	2	3	4	
Sebaran	0	1	3	5	33	42
kantor	1		1	1	19	21
cabang	2		1	2	15	18
	3				6	6
	4				12	12
Total		1	5	8	85	99

Keputusan untuk mendirikan kantor cabang memang sangat berkaitan dengan bagaimana ekspansi perusahaan.

IV.1.8. Jumlah Karyawan

Tabel 10 Jumlah Karyawan

	n	%
< 5 org	38	38,38%
5 s.d 10 org	22	22,22%
11 s.d 20 org	15	15,15%
> 20 org	24	24,24%
Jumlah	99	100,00%

Perusahaan pembiayaan sebagian besar mempunyai jumlah karyawan dibawah 20 orang. Akan tetapi ada satu perusahaan kecil yang memiliki jumlah karyawan yang banyak. Dari data yang diperoleh, perusahaan ini memang sedang giat-giatnya melakukan ekspansi dengan membuka banyak cabang baru. Hal ini tercermin dengan banyaknya kantor cabang yang dimiliki perusahaan tersebut.

Sedangkan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki jumlah karyawan kurang dari 5 orang, sebagian besar tidak memiliki kantor cabang. Dengan demikian diindikasikan ada hubungan antara jumlah karyawan dengan kantor cabang yang dimiliki.

Tabel 11 Korelasi antara Aset Perusahaan, Sebaran Kantor Cabang dan Jumlah Karyawan

Correlations

		Aset Perusahaan	Sebaran kantor cabang	JlhKaryawan
Aset Perusahaan	Pearson Correlation	1	,350**	,445**
	Sig. (2-tailed)	,	,000	,000
	N	99	99	99
Sebaran kantor cabang	Pearson Correlation	,350**	1	,558**
	Sig. (2-tailed)	,000	,	,000
	N	99	99	99
JlhKaryawan	Pearson Correlation	,445**	,558**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,
	N	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil tes korelasi menyatakan bahwa masing-masing variabel aset perusahaan, jumlah karyawan dan kantor cabang mempunyai korelasi positif yang signifikan.

IV. 2. KEMUDAHAN DALAM MENGISI SEMUA FORM YANG DIMINTA DALAM SISTEM LBPP

Dari hasil survey yang didapat, rata – rata perusahaan memberi skor 97,10 pada kemudahan dalam mengisi form-form LBPP. Dari rata-rata tersebut, skor paling besar yang diberi adalah 100. Skor tersebut diberikan oleh 85 perusahaan atau 86%. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pengisian LBPP mudah diisi.

Tabel 12 LBPP Mudah Diisi

	LBPP Mudah Diisi			SKOR
	YA	TIDAK	N/A	
rata-rata	6,74	0,20	1,06	97,10
Max	8,00	3,00	4,00	100,00
Min	3,00	0,00	0,00	50,00
Mode	8,00	0,00	0,00	100,00
Standar Deviasi	1,44	0,55	1,37	8,36

Masukan dari perusahaan mengenai data yang tidak mudah, terutama pada form Daftar Rincian Pembiayaan yaitu kesulitan dalam mengisi lokasi proyek. Lokasi proyek menjadi sulit untuk diisi karena lokasi proyek mencerminkan Dati II tempat barang pembiayaan tersebut berada, dan daftar lokasi proyek disusun menurut Dati I sehingga untuk daerah yang tidak terkenal, perusahaan kesulitan untuk mengisi kode daerahnya.

Kesulitan lainnya adalah pada form rincian pinjaman yang diterima yaitu mutasi penarikan. Karena ada validasi antara mutasi dengan plafon, maka seringkali

perusahaan mengalami *error* jika mutasi penarikan melebihi plafon. Hal ini dimungkinkan karena kemudahan perusahaan pembiayaan dalam mendapatkan pembiayaan dari bank, sehingga terkadang bank mau memberikan pinjaman melebihi plafon yang tercantum dalam perjanjian.

IV. 3. INFORMASI YANG BERMANFAAT DALAM LBPP

Pertanyaan pada kuesioner yang menyatakan tentang manfaat informasi dalam sistem LBPP ada 8 (delapan) pertanyaan. Hasil survey menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam LBPP bermanfaat. Perusahaan pembiayaan rata-rata memberikan skor 94,22 untuk manfaat yang dapat diambil dari LBPP. Dari hasil tersebut 86 dari 99 perusahaan memberikan skor 100.

Tabel 13 LBPP Bermanfaat

	LBPP Bermanfaat			Skor
	Ya	Tidak	N/A	
rata-rata	6,56	0,38	1,06	94,22
Max	8,00	5,00	4,00	100,00
Min	1,00	0,00	0,00	25,00
Mode	8,00	0,00	0,00	100,00
Standar Deviasi	1,75	1,12	1,37	16,86

Dari beberapa masukan yang masuk dalam survey ini, yang menarik adalah banyak perusahaan yang menyatakan bahwa akun-akun yang terkait investasi tidak bermanfaat. Hal ini dikarenakan, kecilnya porsi aset perusahaan pembiayaan yang dimasukkan ke investasi lain. Usaha pembiayaan sendiri sudah memberikan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Sehingga perusahaan enggan untuk menaruh asetnya ke investasi lain.

Masukan lainnya adalah pada form rekening administratif adanya kewajiban untuk memberikan informasi mengenai fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik. Hal ini dikatakan tidak bermanfaat karena kecilnya porsi pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik dibandingkan dengan jumlah nasabah yang dimiliki.

IV. 4. PROSES PENGISIAN DAN PENGIRIMAN DATA

Survey ini juga menanyakan mengenai proses pengisian dan pengiriman data yang dilakukan perusahaan pembiayaan ke ekstranet Bank Indonesia. Pada proses pengisian 81% responden menyatakan bahwa form LBPP mudah diisi. Sedangkan sisanya sebanyak 19 perusahaan menyatakan form LBPP tidak mudah diisi.

Tabel 14 Mudah Mengisi Form LBPP

Mudah mengisi	N	%
Ya	80	81%
Tidak	19	19%
Jumlah	99	100%

Penyebab proses pengisian form ini menjadi tidak mudah diisi dikarenakan pedoman pengisian dan pengklasifikasian pos-pos dalam form LBPP membingungkan.

Masukan yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini adalah perlunya sosialisasi rutin mengenai implementasi LBPP atau minimal diaktifkannya forum tanya jawab di sistem LBPP. Hal ini untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses pengisian dan pengiriman Laporan LBPP.

Sedangkan penyebab lainnya, adalah sistem validasi yang dianggap membingungkan. Terkadang perusahaan telah menjumlah dengan benar, tapi hasil

validasi menyatakan *error* atau ada masalah. Hal ini sebenarnya telah disadari oleh pihak pembuat sistem dengan merevisi sistem LBPP. LBPP versi 2.0, yang merupakan versi terbaru dari LBPP telah mengalami perbaikan dalam sistem validasi, sehingga hal-hal seperti yang tersebut diatas diharapkan tidak terjadi lagi.

Proses selanjutnya yang diamati dalam studi kali ini adalah proses pengiriman. 87 perusahaan dari 99 perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengiriman laporan via *online* mudah dilakukan

Tabel 15 Mudah Mengirim Laporan Via *online*

Mudah Mengirim	N	%
Ya	87	88%
Tidak	12	12%
Jumlah	99	100%

Bagi perusahaan yang menjawab tidak mudah mengirim laporan via *online* hal ini lebih dikarenakan sulitnya koneksi ke ektranet BI. Hal ini terutama dikarenakan ketika ektranet BI *drop*, tidak ada jalur pemberitahuan langsung kepada perusahaan.

Perubahan signifikan yang terjadi pada Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-1500/LK/2005 adalah digunakannya operating sistem *Windows* menggantikan DOS. Hal ini dilaksanakan mengingat *Windows* sudah digunakan oleh sebagian besar pengguna komputer di Indonesia. Dari hasil survey didapat bahwa 97 perusahaan menganggap penggunaan *windows* sebagai *interface* memudahkan penggunaan LBPP.

Tabel 16 Penggunaan *Windows* memudahkan LBPP

Penggunaan <i>Windows</i> memudahkan LBPP	n	%
Ya	97	98%
Tidak	2	2%
Jumlah	99	100%

Selain itu survey ini juga menanyakan sejauhmana kemungkinan perubahan operating sistem menjadi *open source*. Sekitar 51% responden tidak menyetujuinya. Hal ini dikarenakan *open source* masih belum umum digunakan oleh masyarakat luas.

Tabel 17 Setuju apabila operating sistem LBPP diubah ke *Open source*

Setuju Penggunaan <i>Open source</i>	n	%
Tidak Mengisi/NA	0	0%
Ya	49	49%
Tidak	50	51%
Jumlah	99	100%

IV. 5. KEBUTUHAN DATA INDUSTRI BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Data industri bagi perusahaan pembiayaan sangat dibutuhkan terutama untuk mengambil keputusan dalam melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Sebanyak 87 perusahaan menyatakan memerlukan data industri yang dipublikasikan.

Tabel 18 Perusahaan memerlukan Data Industri yang disebarluaskan

Memerlukan Informasi Data Industri	n	%
Ya	87	88%
Tidak	12	12%
Jumlah	99	100%

Informasi tersebut dikelompokkan menjadi jumlah kontrak/pembiayaan baru, lokasi penyebaran obyek pembiayaan/barang modal dan jenis obyek pembiayaan/barang modal. Laporan ini dapat disupport oleh sistem LBPP dengan penambahan sistem pemrosesan dan pengeluaran yang otomatis dan terintegrasi dalam sistem.

Tabel 19 Informasi Data Industri yang dibutuhkan

Informasi yang diperlukan	n	%
Jumlah kontrak/pembiayaan baru	58	59%
Lokasi penyebaran obyek pembiayaan/barang modal	69	70%
jenis obyek pembiayaan/barang modal	71	72%

Sedangkan tambahan informasi lainnya adalah daftar nama kreditur bermasalah. Perusahaan pembiayaan menginginkan daftar ini agar perusahaan dapat menekan resiko konsumen. Bank Indonesia telah menggandeng beberapa perusahaan pembiayaan untuk masuk ke dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Yaitu suatu sistem yang menghubungkan bank dan lembaga pembiayaan untuk bertukar informasi mengenai debitur yang mereka punya. Dalam sistem ini, perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah utang debitur disetiap bank dan perusahaan pembiayaan dan *track record*-nya. Pada tahun ini, baru 4 (empat) perusahaan pembiayaan yang masuk dalam sistem tersebut. Masih sedikitnya perusahaan yang masuk dikarenakan *fee* yang dikenakan dalam sistem ini dirasakan masih kurang seimbang dengan manfaatnya, kecuali terutama untuk perusahaan yang memang sedang giat menyebar pembiayaannya.

IV. 6. PENGGUNAAN LAPORAN HASIL SISTEM LBPP

Laporan hasil sistem LBPP adalah data mentah yang kemudian akan diolah oleh regulator industri jasa pembiayaan sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan. Data tersebut merupakan data yang *up to date* sehingga lebih mencerminkan kondisi sekarang. Pada saat ini, data mentah tersebut harus disupport dari Bank Indonesia, karena Biro Pembiayaan dan Penjaminan belum dapat melakukan akses langsung ke ekstranet BI.

Data mentah tersebut dalam bentuk *file txt* per perusahaan. Data mentah ini sendiri belum dapat langsung digunakan, karenanya harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan data tersebut dapat dengan menggunakan *Microsoft Excel* atau yang sejenis. Informasi dari Biro Pembiayaan dan Penjaminan, pengolahan data mentah ini memakan waktu yang cukup lama dikarenakan pegawai tersebut tidak dapat secara khusus fokus mengerjakan hal itu saja.

Laporan yang dapat dihasilkan dari pemrosesan data ini dapat mencakup bidang tugas Biro Pembiayaan dan Penjaminan, khususnya untuk Bagian Lembaga Pembiayaan dan Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan.

Untuk Bagian Lembaga Pembiayaan, laporan yang harus dihasilkan adalah laporan analisis perusahaan pembiayaan dan laporan monitoring perusahaan pembiayaan. Sedangkan untuk bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan, laporannya adalah laporan kinerja perusahaan pembiayaan dan ketaatan perusahaan pembiayaan. Semua laporan ini terutama mencakup hal – hal yang tercantum dalam PMK 84/PMK.012/2006 yaitu :

➤ Pasal 11

Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari total Aktiva.

➤ Pasal 14

Kepemilikan saham oleh badan usaha asing ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.

➤ Pasal 15

(1) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal sendiri.

➤ Pasal 25

(3) Jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (*networth*) dan Pinjaman Subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh) kali.

➤ Pasal 29

(2) penyertaan modal pada setiap perusahaan di sektor keuangan tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor perusahaan yang menerima penyertaan.

(3) Jumlah seluruh penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah modal sendiri Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Dalam membuat laporan tersebut, Biro Pembiayaan dan Penjaminan juga memerlukan informasi tambahan yaitu mengenai tingkat suku bunga Bank Indonesia, tingkat inflasi, dan indeks harga konsumen.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

V. 1. KESIMPULAN

1. Informasi yang digunakan sebagai bahan dalam mengisi form-form laporan pada sistem LBPP mudah didapat dan memiliki manfaat.
2. Proses pengisian dan pengiriman laporan ke dalam sistem LBPP oleh Perusahaan Pembiayaan dapat dilakukan dengan mudah
3. Perusahaan pembiayaan menginginkan adanya *feedback* berupa data industri yang dipublikasikan sehingga dapat bermanfaat bagi manajemen Perusahaan Pembiayaan.
4. Data yang dihasilkan sistem LBPP merupakan data mentah yang dapat digunakan oleh Biro Pembiayaan dan Penjaminan sebagai suatu bahan analisis pengambilan kebijakan. Untuk memperoleh data sesuai kebutuhan Biro Pembiayaan dan Penjaminan diperlukan pengolahan lebih lanjut untuk sampai pada tersedianya laporan-laporan yang dapat langsung digunakan dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan pembiayaan.

V. 2. REKOMENDASI

1. Perlunya diadakan sosialisasi yang berkesinambungan untuk menjelaskan perkembangan sistem LBPP dan menjadi saran masukan dalam merespon permasalahan dalam proses pengisian dan pengiriman laporan dari Perusahaan pembiayaan.

2. Perlunya pengembangan sistem LBPP dari sistem pelaporan perusahaan pembiayaan menjadi sistem yang terintegrasi sehingga *outputnya* dapat langsung dirasakan oleh Bapepam LK khususnya Biro Pembiayaan dan Penjaminan.
3. Salah satu upaya mengedepankan fungsi pengendalian terhadap sistem LBPP diperlukan *feedback* berupa data industri yang dipublikasikan secara rutin sehingga dapat dimanfaatkan oleh kalangan industri jasa pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dajan, Anto (1990). *Pengantar Metode Statistik Jilid II*. Jakarta : LPT CES.
- Bank Indonesia, (2006, Juli 10), *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum*
- Departemen Keuangan (2006) *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan*.
- Departemen Keuangan (2005, Mei 4). *Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP-1500/LK/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Perusahaan Pembiayaan*.
- Departemen Keuangan (2002, April 23). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tentang Perusahaan Pembiayaan*.
- Departemen Keuangan & Bank Indonesia (2005). *Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Kegiatan Usaha Semesteran Perusahaan Pembiayaan*. Jakarta.
- Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan (2006). *Laporan Akhir Tim Penyusun Penyempurnaan Peraturan Perundangan tentang Perusahaan Pembiayaan*. Jakarta.
- Bapepam (2005). *Hasil studi Analisis Laporan Keuangan Secara Elektronik*, Jakarta
- Rahmat, Budi (2004). *Multi Finance Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance) Indonesian Perspective*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono (2002). *Statistika Untuk Penelitian* (edisi ke-4). Bandung : CV Alfabeta.
- Supranto, J. (1989). *Statistik: Teori dan Aplikasi* (2th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Tejoyuwono Notohadiprawiro (1990, Oktober). *Bahan Seminar UGM*.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KODE:
PP**

**SURVEY MENGENAI IMPLEMENTASI
SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN
BERDASARKAN
KEPUTUSAN DIRJEN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP-1500/LK/2005
TANGGAL 4 MEI 2005**

BIRO RISET DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BEKERJA SAMA DENGAN
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
2007
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dari Biro Riset dan Teknologi Informasi (RisTi) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah melakukan kegiatan penelitian untuk memberikan kontribusi pemikiran/tanggapan dan atau rekomendasi atas hal-hal yang berkembang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, Departemen Keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut, Biro RisTi akan melakukan survey yang merupakan bagian dari studi mengenai implementasi sistem pelaporan keuangan perusahaan pembiayaan yang dilakukan oleh Tim Studi Tentang Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-1500/LK/2005 Tanggal 4 Mei 2005, Biro Riset dan Teknologi Informasi, Bapepam LK.

Survey ini dirasakan perlu dilakukan dengan beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan yaitu:

- a. *Output* sistem pelaporan keuangan perusahaan pembiayaan merupakan data mentah yang harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Departemen Keuangan.
- b. Data yang diperoleh dari sistem pelaporan keuangan perusahaan pembiayaan merupakan data industri pembiayaan secara keseluruhan yang sangat berguna bagi pengembangan industri tersebut.
- c. Masih banyaknya kendala di lapangan pada saat penerapan sistem pelaporan keuangan terutama kesiapan perusahaan pembiayaan dalam mengimplementasikan sistem tersebut.
- d. Belum optimalnya penggunaan sistem pelaporan keuangan bagi pengambilan keputusan oleh manajemen Perusahaan Pembiayaan.

Agar dapat memberikan masukan untuk perbaikan sistem pelaporan keuangan perusahaan pembiayaan perlu dilakukan evaluasi sehingga dapat menjadi sistem yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk pengembangan industri perusahaan pembiayaan.

Survey ini ditujukan kepada industri perusahaan pembiayaan yang disusun dalam bentuk beberapa pilihan sederhana dan pilihan yang memerlukan penjelasan yang lebih detail. Kami sangat berterima kasih apabila Saudara dapat memberikan penjelasan/masukan yang detail berkaitan dengan penelitian dimaksud.

Selain itu melalui studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan industri perusahaan pembiayaan melalui kebijakan yang akan dilakukan, baik melalui penyempurnaan peraturan perundangan maupun kebijakan lain.

Jawaban maupun tanggapan Saudara atas Kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan studi.

Beri Tanda Silang (x) atau Check (√) pada kotak yang sesuai dengan kondisi Anda.

I. RESPONDEN

1. Jabatan di Perusahaan

<input type="checkbox"/> Staf	<input type="checkbox"/> Direksi
<input type="checkbox"/> Manager	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan).....
2. Bagian/Divisi

<input type="checkbox"/> Sumber Daya Manusia	<input type="checkbox"/> Keuangan/Akuntansi
<input type="checkbox"/> Sekretariat/Humas	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan).....

II. PERUSAHAAN

3. Status Kepemilikan Perusahaan

<input type="checkbox"/> BUMN	<input type="checkbox"/> Patungan (JV)
<input type="checkbox"/> Swasta Nasional	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan).....
4. Bentuk Badan Usaha

<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas	<input type="checkbox"/> Koperasi
---	-----------------------------------
5. Sifat Perusahaan

<input type="checkbox"/> Perusahaan Terbuka (Tbk)	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan).....
<input type="checkbox"/> Perusahaan Non Terbuka	
6. Aset Perusahaan

<input type="checkbox"/> kurang dari Rp. 25 juta	<input type="checkbox"/> antara Rp. 81 juta – Rp. 250 juta
<input type="checkbox"/> antara Rp. 25 juta -Rp. 80 juta	<input type="checkbox"/> lebih dari Rp. 250 juta
7. Jumlah kantor cabang

<input type="checkbox"/> Pulau Jawa
<input type="checkbox"/> Pulau Sumatra
<input type="checkbox"/> Pulau Kalimantan
<input type="checkbox"/> Pulau Sulawesi
<input type="checkbox"/> Pulau Irian
<input type="checkbox"/> Pulau Lain
8. Jumlah karyawan bagian akuntansi/keuangan dan IT

<input type="checkbox"/> kurang dari 5 orang	<input type="checkbox"/> antara 10 – 20 orang
<input type="checkbox"/> antara 5 – 10 orang	<input type="checkbox"/> lebih dari 20 orang
9. Tingkat pendidikan karyawan bagian akuntansi/keuangan dan IT

<input type="checkbox"/> Setingkat D1
<input type="checkbox"/> Setingkat DIII
<input type="checkbox"/> Setingkat S1
<input type="checkbox"/> Setingkat S2
<input type="checkbox"/> Setingkat S3

III. DATA LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Neraca

1. Apakah semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi pos-pos pada form Neraca mudah didapatkan?
 Ya (langsung ke nomor 4) Tidak
2. Sebutkan pos – pos yang tidak mudah diisi tersebut.

3. Kesulitan apa yang anda rasakan?
 Informasi tidak dapat diperoleh dan tidak terklasifikasi
 Informasi dapat diperoleh tetapi tidak terklasifikasi
 Informasi terklasifikasi tetapi tidak dapat diperoleh
4. Apakah semua informasi dalam form Neraca dibutuhkan dan bermanfaat bagi perusahaan Anda?
 Ya (langsung ke nomor 6) Tidak
5. Sebutkan pos – pos yang tidak bermanfaat tersebut.

Rugi Laba

6. Apakah semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi pos-pos pada form Rugi Laba mudah didapatkan?
 Ya (langsung ke nomor 9) Tidak
7. Sebutkan pos – pos yang tidak mudah diisi tersebut.

8. Kesulitan apa yang anda rasakan?
 Informasi tidak dapat diperoleh dan tidak terklasifikasi
 Informasi dapat diperoleh tetapi tidak terklasifikasi
 Informasi terklasifikasi tetapi tidak dapat diperoleh
9. Apakah semua informasi dalam form Rugi Laba dibutuhkan dan bermanfaat bagi perusahaan Anda?
 Ya (langsung ke nomor 11) Tidak
10. Sebutkan pos – pos yang tidak bermanfaat tersebut.

Rekening Administratif

11. Apakah semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi pos-pos pada form Rekening Administratif mudah didapatkan?

- Ya (langsung ke nomor 14) Tidak

12. Sebutkan pos – pos yang tidak mudah diisi tersebut.

-

13. Kesulitan apa yang anda rasakan?

- Informasi tidak dapat diperoleh dan tidak terklasifikasi
 Informasi dapat diperoleh tetapi tidak terklasifikasi
 Informasi terklasifikasi tetapi tidak dapat diperoleh

14. Apakah semua informasi dalam form Rekening Administratif dibutuhkan dan bermanfaat bagi perusahaan Anda?

- Ya (langsung ke nomor 16) Tidak

15. Sebutkan pos – pos yang tidak bermanfaat tersebut.

-

Arus Kas

16. Apakah semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi pos-pos pada form Arus Kas mudah didapatkan?

- Ya (langsung ke nomor 19) Tidak

17. Sebutkan pos – pos yang tidak mudah diisi tersebut.

-

18. Kesulitan apa yang anda rasakan?

- Informasi tidak dapat diperoleh dan tidak terklasifikasi
 Informasi dapat diperoleh tetapi tidak terklasifikasi
 Informasi terklasifikasi tetapi tidak dapat diperoleh

19. Apakah semua informasi dalam form Arus Kas dibutuhkan dan bermanfaat bagi perusahaan Anda?

- Ya (langsung ke nomor 21) Tidak

20. Sebutkan pos – pos yang tidak bermanfaat tersebut.

-

Daftar Rincian Profil Jatuh Tempo Perusahaan Pembiayaan

21. Apakah semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi pos-pos pada form Daftar Rincian Profil Jatuh Tempo Perusahaan Pembiayaan mudah didapatkan?
 Ya (langsung ke nomor 24) Tidak
22. Sebutkan pos – pos yang tidak mudah diisi tersebut.

23. Kesulitan apa yang anda rasakan?
 Informasi tidak dapat diperoleh dan tidak terklasifikasi
 Informasi dapat diperoleh tetapi tidak terklasifikasi
 Informasi terklasifikasi tetapi tidak dapat diperoleh
24. Apakah semua informasi dalam form Daftar Rincian Profil Jatuh Tempo Perusahaan Pembiayaan dibutuhkan dan bermanfaat bagi perusahaan Anda?
 Ya (langsung ke nomor 26) Tidak
25. Sebutkan pos – pos yang tidak bermanfaat tersebut.

Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki

26. Apakah semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi pos-pos pada form Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki mudah didapatkan?
 Ya (langsung ke nomor 29) Tidak
27. Sebutkan pos – pos yang tidak mudah diisi tersebut.

28. Kesulitan apa yang anda rasakan?
 Informasi tidak dapat diperoleh dan tidak terklasifikasi
 Informasi dapat diperoleh tetapi tidak terklasifikasi
 Informasi terklasifikasi tetapi tidak dapat diperoleh
29. Apakah semua informasi dalam form Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki dibutuhkan dan bermanfaat bagi perusahaan Anda?
 Ya (langsung ke nomor 31) Tidak
30. Sebutkan pos – pos yang tidak bermanfaat tersebut.

Daftar Rincian Pembiayaan

31. Apakah semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi pos-pos pada form Daftar Rincian Pembiayaan mudah didapatkan?

- Ya (langsung ke nomor 34) Tidak

32. Sebutkan pos – pos yang tidak mudah diisi tersebut.

-

33. Kesulitan apa yang anda rasakan?

- Informasi tidak dapat diperoleh dan tidak terklasifikasi
 Informasi dapat diperoleh tetapi tidak terklasifikasi
 Informasi terklasifikasi tetapi tidak dapat diperoleh

34. Apakah semua informasi dalam form Daftar Rincian Pembiayaan dibutuhkan dan bermanfaat bagi perusahaan Anda?

- Ya (langsung ke nomor 36) Tidak

35. Sebutkan pos – pos yang tidak bermanfaat tersebut.

-

Daftar Rincian Penyertaan Modal

36. Apakah semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi pos-pos pada form Daftar Rincian Penyertaan Modal mudah didapatkan?

- Ya (langsung ke nomor 39) Tidak

37. Sebutkan pos – pos yang tidak mudah diisi tersebut.

-

38. Kesulitan apa yang anda rasakan?

- Informasi tidak dapat diperoleh dan tidak terklasifikasi
 Informasi dapat diperoleh tetapi tidak terklasifikasi
 Informasi terklasifikasi tetapi tidak dapat diperoleh

39. Apakah semua informasi dalam form Daftar Rincian Penyertaan Modal dibutuhkan dan bermanfaat bagi perusahaan Anda?

- Ya (langsung ke nomor 41) Tidak

40. Sebutkan pos – pos yang tidak bermanfaat tersebut.

-

Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima

41. Apakah semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi pos-pos pada form Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima mudah didapatkan?

- Ya (langsung ke nomor 44) Tidak

42. Sebutkan pos – pos yang tidak mudah diisi tersebut.

-

43. Kesulitan apa yang anda rasakan?

- Informasi tidak dapat diperoleh dan tidak terklasifikasi
 Informasi dapat diperoleh tetapi tidak terklasifikasi
 Informasi terklasifikasi tetapi tidak dapat diperoleh

44. Apakah semua informasi dalam form Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima dibutuhkan dan bermanfaat bagi perusahaan Anda?

- Ya (langsung ke nomor 46) Tidak

45. Sebutkan pos – pos yang tidak bermanfaat tersebut.

-

Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan

46. Apakah semua informasi yang dibutuhkan untuk mengisi pos-pos pada form Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan mudah didapatkan?

- Ya (langsung ke nomor 49) Tidak

47. Sebutkan pos – pos yang tidak mudah diisi tersebut.

-

48. Kesulitan apa yang anda rasakan?

- Informasi tidak dapat diperoleh dan tidak terklasifikasi
 Informasi dapat diperoleh tetapi tidak terklasifikasi
 Informasi terklasifikasi tetapi tidak dapat diperoleh

49. Apakah semua informasi dalam form Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan dibutuhkan dan bermanfaat bagi perusahaan Anda?

- Ya (langsung ke nomor 51) Tidak

50. Sebutkan pos – pos yang tidak bermanfaat tersebut.

-

IV. PENGIRIMAN DATA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN VIA ONLINE

- 51. Apakah perusahaan anda mudah dalam proses pengisian form LBPP?
 Ya (langsung ke nomor 53) Tidak

- 52. Kesulitan apa yang anda rasakan? (jawaban bisa lebih dari satu)
 pedoman pengisian masih kurang jelas
 pengklasifikasian pos-pos dalam form LBPP membingungkan
 adanya pergantian staf sehingga staf baru belum sepenuhnya paham
 lainnya, sebutkan

- 53. Apakah perusahaan anda mudah dalam proses pengiriman data via online?
 Ya (langsung ke nomor 55) Tidak

- 54. Kesulitan apa yang anda rasakan? (jawaban bisa lebih dari satu)
 biaya pengadaan perangkat keras/hardware mahal
 koneksi ke esktranet BI sulit
 lainnya, sebutkan

- 55. Apakah penggunaan *Windows* sebagai *operating system* memudahkan penggunaan sistem LBPP?
 Ya Tidak

- 56. Apakah anda setuju dengan penggunaan *open source* sebagai *operating system*?
 Ya Tidak

V. KEBUTUHAN DATA INDUSTRI BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

- 57. Apakah anda memerlukan informasi mengenai data industri pembiayaan?
 Ya Tidak

- 58. Informasi apa yang anda perlukan? (jawaban bisa lebih dari satu)
 jumlah kontrak/pembiayaan baru
 lokasi penyebaran obyek pembiayaan/barang modal
 jenis obyek pembiayaan/barang modal
 lainnya, sebutkan

VI. KENDALA DAN MASUKAN DALAM IMPLEMENTASI LBPP

Pada bagian ini, anda dapat menyampaikan hal-hal selain di atas yang menjadi **kendala** atau **masukan** dalam implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Bulanan Perusahaan Pembiayaan :

.....
.....
.....
.....
.....

---- Selesai---

